



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, pt.sulselbar@gmail.com

Nomor : 7714 /WKPT.W22-U/RA1.1/XII/2025 Makassar, 2 Desember 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Tindak Lanjut Evaluasi
Penilaian SAKIP Tahun 2024

Kepada Yth,

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI nomor : 3689/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Makassar, dengan ini kami sampaikan laporan tindak lanjut Pengadilan Tinggi Makassar sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Dokumen Sakip tahun yang akan datang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR


SUWONO, SH., SE., M.Hum.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Urip Sumohardjo KM. 4

Telp : (0411) 448365 Fax : (0411) 448365 - 448366

Website : www.pt-makassar.go.id

Makassar 90232

**LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI SAKIP PADA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.
7. PERPRES No. 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
10. Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 3689/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Makassar.

B. Ruang Lingkup

Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tinggi Makassar

C. Tujuan

Laporan ini dimaksudkan :

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Untuk memantau apakah diadakan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk tahun berikutnya.

D. Metodologi

1. Melaksanakan Rapat Evaluasi penilaian SAKIP antara ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan jajaran dibawahnya.
2. Membagi tugas kepada pejabat yang terkait untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.

E. Waktu Pelaksanaan

Rapat penyusunan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2025.

**BAB II
TINDAKLANJUT**

HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG
A. PERENCANAAN KINERJA						
1 Telah terdapat pedoman penyusunan kinerja yang disusun namun belum spesifik untuk satuan kerja internal PT Makassar	Agar pedoman yang telah disusun hendaknya menjabarkan secara spesifik penyusunan perencanaan kinerja yang disesuaikan dengan kebiasaan dan mekanisme yang dapat diterima	Untuk periode berikutnya PT Makassar akan menyusun pedoman yang menjabarkan secara spesifik terkait penyusunan perencanaan kinerja yang disesuaikan dengan kebiasaan dan mekanisme yang sesuai dengan pelaksanaannya	Januari 2026	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Dalam Proses	https://drive.google.com/drive/uf4/folders/18HsBETHfq3tkfsEwGo288Ls4BwoHIAuw
2 Belum melampirkan bukti dokumen perencanaan kinerja yang dipublikasikan tepat waktu (bukti upload Renstra, RKT, PKT Tahun 2024)	Agar pedoman yang telah disusun hendaknya menjabarkan secara spesifik penyusunan perencanaan kinerja yang disesuaikan dengan kebiasaan dan mekanisme yang dapat diterima	Data pendukung publikasi perencanaan kinerja yang tepat waktu telah dilampirkan	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/uf4/folders/18HsBETHfq3tkfsEwGo288Ls4BwoHIAuw

<p>Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai, karena penetapan indikator kinerja belum menyajikan seluruh indikator kinerja yang seharusnya diukur. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja hanya menetapkan indikator utama, sementara indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja, belum ditetapkan</p>	<p>Dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan seluruh kebutuhan kinerja yang perlu dicapai. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja agar menetapkan indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja</p>	<p>Dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi, indikator kinerja atas tugas dan fungsi satuan kerja di Tahun 2024 sudah jelas namun adapun untuk indikator kinerja lainnya nanti di Tahun 2025 akan disesuaikan dengan IKU yang terbaru</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/4/folders/18HsBETHfq3tkfsEwGo288Ls4BwoHIAuw</p>
<p>Uraian yang dijelaskan dalam kolom keterangan belum sejalan dengan dokumen yang dilampirkan dalam google drive e-semar</p>	<p>Agar uraian dalam kolom "Catatan" dalam Aplikasi e-Semar diisi sesuai dengan uraian yang menjawab kriteria "kualitas rumusan hasil tujuan/sasaran yang menggambarkan kondisi yang kinerja yang ingin dicapai", dan begitu pula isian "catatan" pada</p>	<p>Uraian dalam kolom "Catatan" dalam Aplikasi e-Semar telah diisi sesuai dengan uraian yang menjawab kriteria "kualitas rumusan hasil tujuan/sasaran yang menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai", dan begitu pula dengan isian "catatan" pada kriteria-kriteria pada</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/4/folders/18HsBETHfq3tkfsEwGo288Ls4BwoHIAuw</p>

	<p>Dokumen revidi atas Renstra maupun IKU belum menyampaikan alasan perubahan.</p>	<p>kriteria-kriteria pada sub komponen lainnya</p>	<p>subkomponen lainnya</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/18HsBETHfq3tkfsEwG0288Ls4BwoHIAUW</p>
5	<p>Dokumen revidi atas Renstra maupun IKU harus menyampaikan alasan perubahan. Rekomendasi perubahan dokumen RENSTRA dan IKU dapat memperhatikan SK Kabawas No. 121/BP/SK.PW1/XII/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia</p>	<p>Dokumen revidi atas Renstra maupun IKU harus menyampaikan alasan perubahan. Rekomendasi perubahan dokumen RENSTRA dan IKU dapat memperhatikan SK Kabawas No. 121/BP/SK.PW1/XII/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia</p>	<p>Dokumen revidi atas Renstra 2020-2024 telah disusun</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/18HsBETHfq3tkfsEwG0288Ls4BwoHIAUW</p>
6	<p>Pohon kinerja belum menggambarkan kondisi atau hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan</p>	<p>Agar pohon kinerja ditetapkan hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan</p>	<p>Pohon kinerja telah menetapkan hasil yang akan dicapai sesuai target kinerja</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/18HsBETHfq3tkfsEwG0288Ls4BwoHIAUW</p>
7	<p>Belum dijelaskan per crosscutting antara kegiatan dengan kepaniteraan dengan kesekretariatan begitu pula dengan instansi lainnya</p>	<p>Agar cascading yang digambarkan juga menjelaskan per crosscutting kegiatan antar bidang yakni kepaniteraan dengan kesekretariatan</p>	<p>Cascading yang digambarkan juga menjelaskan per crosscutting kegiatan antara bidang kepaniteraan dengan kesekretariatan, sudah dijelaskan</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/18HsBETHfq3tkfsEwG0288Ls4BwoHIAUW</p>

	<p>Hasil yang ingin dicapai belum ditetapkan kegiatan seperti contoh yang telah dilampirkan berupa SOP PTSP yang belum ditetapkan waktu yang dibutuhkan untuk diselesaikan di layanan PTSP, namun secara rinci waktunya sudah ditetapkan</p>	<p>Agar ditetapkan hasil yang ingin dicapai per kegiatan yang telah diidentifikasi</p>	<p>dalam catatan pada Aplikasi Semar</p> <p>Hasil yang ingin dicapai per kegiatan yang telah diidentifikasi telah dijelaskan dalam catatan pada Aplikasi Semar dan contohnya adalah SOP Penyelesaian Perkara Perdata (ecourt)</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/4/folders/18HsBETHfq3tkfsEwGo288Ls4BwoHIAUW</p>
<p>9</p>	<p>Penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi belum sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT. 01.17/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022</p>	<p>Dalam penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT. 01.17/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022</p>	<p>Dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 telah disesuaikan dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT. 01.17/2023</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/4/folders/18HsBETHfq3tkfsEwGo288Ls4BwoHIAUW</p>
<p>B. PENGUKURAN KINERJA</p>							
<p>1.</p>	<p>Belum ada otorisasi dari Pejabat terkait dalam hal</p>	<p>Agar ditambahkan aktivitas otorisasi atas dokumen yang</p>	<p>Dokumen (Pidana, Perdata dan Pidana Khusus) yang</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1myzm</p>

pengumpulan data kinerja	dikumpulkan dalam SOP pengumpulan data kinerja atau dengan SOP baru	dikumpulkan sesuai dalam SOP pengumpulan data Kinerja telah diotorisasi oleh Panitia Pengadilannya Tinggi Makassar				ef3lBe0X4eSZg OgPH- agbN9JCdL2
2. Pengukuran capaian kinerja masih dilakukan secara manual. Pengukuran kinerja personel hakim sudah dilakukan oleh sistem namun pengukurannya belum terintegrasi dengan IKU satker	Agar diupayakan pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (Ms Excel) dan untuk tahun-tahun berikutnya diupayakan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP	November 2025	Ketua Pengadilannya Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1myzmef3lBe0X4eSZgOgPH-agbN9JCdL2
C. PELAPORAN KINERJA						
1. Dokumen LKJIP telah menginformasikan terkait upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja per indikator kinerja namun belum sesuai dengan format pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	Agar penyusunan LKJIP pada bab 3 mengikuti format ketentuan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	Penyusunan LKJIP pada bab 3 tahun berikutnya akan mengikuti format ketentuan permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	November 2025	Ketua Pengadilannya Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1QIFcWvGHWFU6bA8eg67mnTKPI-sdvANm

<p>2. Dokumen LKJIP telah menginformasikan terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara umum, namun belum diinformasikan secara spesifik atau khusus seperti sumber daya manusia atau sumber daya anggaran</p>	<p>Agar informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya diuraikan detail, seperti: sumber daya manusia berikut uraiannya, dan sumber daya anggaran berikut uraiannya, dst</p>	<p>Informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya telah diuraikan detail yaitu sumber manusia dan sumber anggaran</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadil Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1QiFcWvGHWFU6bA8eq67mnTKPI-sdvANm</p>
<p>3. Dokumen LKJIP telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), namun belum sesuai dengan format pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014</p>	<p>Agar informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya detail, seperti: sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran berikut uraiannya, dst</p>	<p>Informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya telah diuraikan detail yaitu sumber manusia dan sumber anggaran</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadil Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1QiFcWvGHWFU6bA8eq67mnTKPI-sdvANm</p>
<p>4. Aktivitas yang diuraikan dalam permasalahan untuk dilakukan penyelesaian belum selaras dengan aktivitas yang terkait dengan pencapaian IKU (48 aktivitas)</p>	<p>Agar aktivitas yang diuraikan dalam evidence yang disertakan diselaraskan dengan aktivitas yang sudah ditetapkan guna pencapaian IKU</p>	<p>Aktivitas yang diuraikan dalam evidence disertakan dengan aktivitas yang ditetapkan pencapaian IKU melalui monitoring rencana aksi</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadil Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1QiFcWvGHWFU6bA8eq67mnTKPI-sdvANm</p>

<p>Dalam dokumen belum menginformasikan perubahan budaya kinerja organisasi terkait pencapaian kinerja</p>	<p>Agar perubahan budaya kinerja organisasi/satuan kerja disertakan, jika tidak perlu diuraikan alasannya</p>	<p>Sudah melengkapi eviden perubahan budaya kinerja organisasi/satuan kerja dengan mengimplementasikan core value ASN berakhlak serta memanfaatkan hasil evaluasi capaian kinerja sebagai patokan dalam peningkatan kualitas kinerja. Serta pemberian reward untuk Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1QiFcWvGHWFU6bA8eq67mnTKPI-sdvANm</p>
<p>5.</p>						

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

<p>1. Pedoman teknis internal belum menjelaskan hal-hal yang diatur secara detail (masih sama dengan ketentuan umum yaitu SK Sekma 878/SEK/SKM/2022) untuk evaluasi internal di satuan kerja PT Makassar</p>	<p>Agar pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh ketua hendaknya mengatur hal-hal lebih lanjut atas aturan Mahkamah Agung atau MenPAN yang masih bersifat umum</p>	<p>Pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh Ketua PT Makassar akan diupdate agar lebih spesifik</p>	<p>November 2025</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1BwXxB0IhSamcZ-nMb1inB-4V0siEA</p>
--	---	--	----------------------	---	----------------	--

2.	Belum dilakukan Evaluasi Internal yang dilaksanakan secara berjenjang	Agar perlu dilakukan evaluasi internal berjenjang, yakni jabatan eselon 2 melakukan evaluasi berjenjang ke bawahnya, begitu seterusnya ke bawah	Dokumen evaluasi internal berjenjang, yakni pejabatan eselon 2 melakukan evaluasi berjenjang kebawahnya telah diupload	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/uf4/folders/1BwnXxB0jHSamcZ-nMb1nB-4V0sIEA
3.	Pedoman teknis evaluasi internal belum menjelaskan hal-hal yang diatur secara umum yaitu SK Sekma detail (masih sama dengan ketentuan 878/SEK/SK/VII/2022) untuk evaluasi internal di satuan kerja PT Makassar	Agar pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh ketua hendaknya mengatur hal-hal lebih lanjut atas aturan Mahkamah Agung atau MenPAN yang masih bersifat umum	Pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh Ketua PT Makassar akan diupdate agar lebih spesifik	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/uf4/folders/1BwnXxB0jHSamcZ-nMb1nB-4V0sIEA
4.	Data dukung kurang memadai, belum melampirkan evaluasi atau revidu atas indikator kinerja Upaya Hukum Kasasi	Agar melampirkan evaluasi dengan pendalaman atas revisi IKU upaya hukum kasasi dari target semula menjadi 45%	Evaluasi dengan pendalaman atas revisi indikator kinerja upaya hukum kasasi dari target semula menjadi 45% telah tertuang dalam dokumen rapat	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/uf4/folders/1BwnXxB0jHSamcZ-nMb1nB-4V0sIEA
5.	Belum dilakukan evaluasi pada kedua unit dibawahnya, yakni: kepaniteraan dan kesekretariatan	Selain melalui rapat bulanan, evaluasi kinerja hendaknya dapat dilakukan oleh pengawas bidang sesuai surat	SK penunjukan Hakim Tinggi pengawas bidang telah diupload	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/uf4/folders/1BwnXxB0jHSamcZ-nMb1nB-4V0sIEA

	keputusan atau tim melalui penugasan	Tindak lanjut hasil evaluasi adalah berupa Reviu Atas perubahan target kinerja upaya hukum kasasi menjadi 45%, nilai capaian menjadi 109,67% dari sebelumnya 99%. Perbandingan target, realisasi dan capaian kami lampirkan sebagai eviden poin 7	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1BwnMb1inB-4V0siEA
6.	Agar juga melampirkan evidence tindak lanjut hasil evaluasi seperti atas hasil reviu atas perubahan IKU Upaya hukum kasasi dengan target menjadi 45%	Tindak lanjut hasil evaluasi adalah berupa Reviu Atas perubahan target kinerja upaya hukum kasasi menjadi 45%, nilai capaian menjadi 109,67% dari sebelumnya 99%. Perbandingan target, realisasi dan capaian kami lampirkan sebagai eviden poin 7	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1BwnMb1inB-4V0siEA
7.	Agar melampirkan evidence perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik dari pemanfaatan hasil evaluasi kinerja berjenjang ataupun pengawas bidang, jika tidak ada perlu uraian penjelasan	Eviden perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik dari pemanfaatan hasil evaluasi kinerja berjenjang ataupun pengawasan bidang telah diupload berupa perbandingan capaian kinerja sebelum dan setelah reviu target kinerja. Dengan adanya evaluasi berjenjang maka	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1BwnMb1inB-4V0siEA
	Belum melampirkan hasil tindak lanjut atas evaluasi IKU Hukum "Upaya Kasasi"	Agar melampirkan evidence perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik dari pemanfaatan hasil evaluasi kinerja berjenjang ataupun pengawas bidang, jika tidak ada perlu uraian penjelasan	November 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1BwnMb1inB-4V0siEA

	Belum melampirkan hasil revidu yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	target yang sulit dicapai dapat direviu sehingga capaian kinerja secara keseluruhan dapat dicapai	November 2025	Ketua Pengadlan Tinggi Makassar	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1BwnMb1jnB-4V0slEA
--	---	---	---	---------------	---------------------------------	---------	---

BAB III

PENUTUP

Laporan Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP pada Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Kami berharap bahwa Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP pada Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025 sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja yang akurat dan mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP pada Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024 kami sampaikan.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar



SUWONO, SH., SE., M.Hum

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

NOTULA

- Dasar** : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
2. Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 3689/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Makassar
- Hari** : Selasa
- Tanggal** : 30 September 2025
- Pukul** : 09:00 WITA
- Tempat** : Ruang Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH, Lt. 2 kantor Pengadilan Tinggi Makassar
- Acara** : - Sosialisasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Rapat tindak lanjut laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar
- Peserta Rapat** : 1. Hakim Tinggi
2. Hakim Ad Hoc Tipikor dan HAM
3. Hakim Yustisial
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Kepala Bagian
7. Panitera Muda
8. Kepala Sub Bagian
9. PP
10. Pejabat Fungsional
11. Staf



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

JALANNYA RAPAT

Rapat terkait Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024 dibuka pada pukul 09.00 WITA oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Bapak Dr. Zainuddin, SH, M.Hum. Kegiatan rapat diawali dengan sambutan sekaligus arahan pembuka dari pimpinan, yang menekankan pentingnya evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja satuan kerja.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian agenda utama rapat, yang meliputi:

- a. Sosialisasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Rapat tindak lanjut laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar

Setelah agenda rapat disampaikan, kegiatan rapat memasuki sesi pemaparan materi sebagai dasar pembahasan dan evaluasi lebih lanjut.

I. SAMBUTAN PIMPINAN RAPAT

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan untuk mendengarkan pemaparan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang selanjutnya akan dipaparkan secara lebih rinci oleh Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran. Beliau menegaskan agar seluruh hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan perbaikan bersama oleh seluruh unit kerja.

II. PEMAPARAN MATERI RAPAT

Rapat evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Makassar dilanjutkan dengan pemaparan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Makassar yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3689/BP/PW1.1.1/IX/2025 oleh Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Makassar ibu Yusi Triany Sinaga, SE, SH, MH yang diuraikan sebagai berikut :

A. Sosialisasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 3689/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Makassar, berikut ini kami sampaikan nilai sakin PT Makassar Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68,10	71,20
Predikat			B (Baik)	BB (Sangat Baik)

1. HASIL EVALUASI BADAN PENGAWASAN

a. Perencanaan Kinerja

1. Telah terdapat pedoman penyusunan kinerja yang disusun namun belum spesifik untuk satuan kerja internal PT Makassar;
2. Belum melampirkan bukti dokumen perencanaan kinerja yang dipublikasikan tepat waktu (bukti upload Renstra, RKT, PKT Tahun 2024).
3. Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai, karena penetapan indikator kinerja belum menyajikan seluruh indikator kinerja yang seharusnya diukur. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja hanya menetapkan indikator utama, sementara indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja, belum ditetapkan;
4. Uraian yang dijelaskan dalam kolom keterangan belum sejalan dengan dokumen yang dilampirkan dalam google drive e-semar;
5. Dokumen reuiu atas Renstra maupun IKU belum menyampaikan alasan perubahan;
6. Pohon kinerja belum menggambarkan kondisi atau hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan;
7. Belum dijelaskan crosscutting per kegiatan antara kepaniteraan dengan kesekretariatan begitu pula dengan instansi lainnya;
8. Hasil yang ingin dicapai belum ditetapkan per kegiatan seperti contoh yang telah dilampirkan berupa SOP PTSP yang belum ditetapkan waktu yang dibutuhkan untuk diselesaikan di layanan PTSP, namun secara rinci waktunya sudah ditetapkan;
9. Penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi belum sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

b. Pengukuran Kinerja

1. Belum ada otorisasi dari Pejabat terkait dalam hal pengumpulan data kinerja;
2. Pengukuran capaian kinerja masih dilakukan secara manual. Pengukuran kinerja personel hakim sudah dilakukan oleh sistem namun pengukurannya belum terintegrasi dengan IKU satker.

c. Pelaporan Kinerja

1. Dokumen LKJIP telah menginformasikan terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara umum, namun belum diinformasikan secara spesifik atau khusus seperti sumber daya manusia atau sumber daya anggaran;
2. Dokumen LKJIP telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), namun belum sesuai dengan format pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;
3. Aktivitas yang diuraikan dalam permasalahan untuk dilakukan penyesuaian belum selaras dengan aktivitas yang terkait dengan pencapaian IKU (48 aktivitas).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Pedoman teknis evaluasi internal belum menjelaskan hal-hal yang diatur secara detail (masih sama dengan ketentuan umum yaitu SK Sekma 878/SEK/SK/VII/2022) untuk evaluasi internal di satuan kerja PT Makassar;
2. Belum dilakukan Evaluasi Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berjenjang
3. Pedoman teknis evaluasi internal belum menjelaskan hal-hal yang diatur secara detail (masih sama dengan ketentuan umum yaitu SK Sekma 878/SEK/SK/VII/2022) untuk evaluasi internal di satuan kerja PT Makassar;
4. Data dukung kurang memadai, belum melampirkan evaluasi atau reviu atas indikator kinerja Upaya Hukum Kasasi;
5. Belum dilakukan evaluasi pada kedua unit dibawahnya, yakni: kepaniteraan dan kesekretariatan;
6. Belum melampirkan hasil tindak lanjut atas evaluasi IKU "Upaya Hukum Kasasi";
7. Belum melampirkan data dukung atas evaluasi yang dilakukan secara berjenjang dan evaluasi internal dari Hakim pengawas Bidang;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

8. Belum melampirkan hasil reviu yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. REKOMENDASI

a. Perencanaan Kinerja

1. Agar pedoman yang telah disusun hendaknya menjabarkan secara spesifik terkait penyusunan perencanaan kinerja yang disesuaikan dengan kebiasaan dan mekanisme yang dapat diterima;
2. Agar pedoman yang telah disusun hendaknya menjabarkan secara spesifik terkait penyusunan perencanaan kinerja yang disesuaikan dengan kebiasaan dan mekanisme yang dapat diterima;
3. Dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan seluruh kebutuhan kinerja yang perlu dicapai. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja agar menetapkan indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja;
4. Agar uraian dalam kolom "Catatan" dalam Aplikasi e-Semar diisi sesuai dengan uraian yang menjawab kriteria "kualitas rumusan hasil tujuan/sasaran yang menggambarkan kondisi yang kinerja yang ingin dicapai", dan begitu pula dengan isian "catatan" pada kriteria-kriteria pada sub komponen lainnya;
5. Dokumen reviu atas Renstra maupun IKU harus menyampaikan alasan perubahan. Rekomendasi perubahan dokumen RENSTRA dan IKU dapat memperhatikan SK Kabawas No. 121/BP/SK.PW1/XII/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Agar pohon kinerja ditetapkan hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan;
7. Agar cascading yang digambarkan juga menjelaskan crosscutting per kegiatan antar bidang yakni kepaniteraan dengan kesekretariatan;
8. Agar ditetapkan hasil yang ingin dicapai per kegiatan yang telah diidentifikasi;
9. Dalam penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

b. Pengukuran Kinerja

1. Agar ditambahkan aktivitas otorisasi atas dokumen yang dikumpulkan dalam SOP pengumpulan data kinerja atau dengan SOP baru;
2. Agar diupayakan pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

c. Pelaporan Kinerja

1. Agar penyusunan LKjIP pada bab 3 mengikuti format ketentuan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014;
2. Agar informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya diuraikan detail, seperti: sumber daya manusia berikut uraiannya, dan sumber daya anggaran berikut uraiannya, dst;
3. Agar informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya diuraikan detail, seperti: sumber daya manusia berikut uraiannya, dan sumber daya anggaran berikut uraiannya, dst;
4. Agar aktivitas yang diuraikan dalam evidence yang disertakan diselaraskan dengan aktivitas yang sudah ditetapkan guna pencapaian IKU;
5. Agar evidence perubahan budaya kinerja organisasi/satuan kerja disertakan, jika tidak perlu diuraikan alasannya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Agar pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh ketua hendaknya mengatur hal-hal lebih lanjut atas aturan Mahkamah Agung atau MenPAN yang masih bersifat umum;
2. Agar perlu dilakukan evaluasi kinerja internal secara berjenjang, yakni jabatan eselon 2 melakukan evaluasi berjenjang ke bawahnya, begitu seterusnya ke bawah;
3. Agar pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh ketua hendaknya mengatur hal-hal lebih lanjut atas aturan Mahkamah Agung atau MenPAN yang masih bersifat umum;
4. Agar melampirkan evaluasi dengan pendalaman atas revisi IKU upaya hukum kasasi dari target semula menjadi 45%;
5. Selain melalui rapat bulanan, evaluasi kinerja hendaknya dapat dilakukan oleh pengawas bidang sesuai surat keputusan atau tim melalui penugasan;
6. Agar juga melampirkan evidence tindak lanjut hasil evaluasi seperti atas hasil reviu atas perubahan IKU Upaya hukum kasasi dengan target menjadi 45%;
7. Agar melampirkan evidence perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik dari pemanfaatan hasil evaluasi kinerja berjenjang ataupun pengawas bidang, jika tidak ada perlu uraian penjelasan;
8. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

B. Tindak lanjut laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar

Perencanaan Kinerja

1. Untuk periode berikutnya PT Makassar akan menyusun pedoman yang menjabarkan secara spesifik terkait penyusunan perencanaan kinerja yang disesuaikan dengan kebiasaan dan mekanisme yang sesuai dengan pelaksanaannya
2. Data dukung publikasi perencanaan kinerja yang tepat waktu telah dilampirkan
3. Dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi, indikator kinerja atas tugas dan fungsi satuan kerja di Tahun 2024 sudah jelas namun adapun untuk indikator kinerja lainnya nanti di Tahun 2025 akan disesuaikan dengan IKU yang terbaru
4. Uraian dalam kolom "Catatan" dalam Aplikasi e-Semar telah diisi sesuai dengan uraian yang menjawab kriteria "kualitas rumusan hasil tujuan/sasaran yang menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai", dan begitu pula dengan isian "catatan" pada kriteria-kriteria pada subkomponen lainnya
5. Dokumen rewiu atas Renstra Tahun 2020-2024 telah disusun
6. Pohon kinerja telah menetapkan hasil yang akan dicapai sesuai target kinerja
7. Cascading yang digambarkan juga menjelaskan crosscutting per kegiatan antara bidang yakni kepaniteraan dengan kesekretariatan, sudah dijelaskan dalam catatan pada Aplikasi Semar
8. Hasil yang ingin dicapai per kegiatan yang telah diidentifikasi telah dijelaskan dalam catatan pada Aplikasi Semar dan contohnya adalah SOP Penyelesaian Perkara Perdata (ecourt)
9. Dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 telah disesuaikan dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023

Pengukuran Kinerja

1. Dokumen (Pidana, Perdata dan Pidana Khusus) yang dikumpulkan sesuai dalam SOP pengumpulan data Kinerja telah diotorisasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (Ms Excel) dan untuk tahun-tahun berikutnya diupayakan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediscenterptmakassar@gmail.com

Pelaporan Kinerja

1. Penyusunan LKJiP pada bab 3 tahun berikutnya akan mengikuti format ketentuan permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
2. Informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya telah diuraikan detail yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran
3. Informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya telah diuraikan detail yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran
4. Aktifitas yang diuraikan dalam eviden yang disertakan telah diselaraskan dengan aktivitas yang sudah ditetapkan guna pencapaian IKU melalui monitoring rencana aksi
5. Sudah melengkapi eviden perubahan budaya kinerja organisasi/satuan kerja dengan mengimplementasikan core value ASN berakhlak serta memanfaatkan hasil evaluasi capaian kinerja sebagai patokan dalam peningkatan kualitas kinerja. Serta pemberian reward untuk Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh Ketua PT Makassar akan diupdate agar lebih spesifik
2. Dokumen rapat evaluasi kinerja internal secara berjenjang, yakni pejabatan eselon 2 melakukan evaluasi berjenjang kebawahnya telah diupload
3. Pedoman teknis evaluasi internal yang ditetapkan oleh Ketua PT Makassar akan diupdate agar lebih spesifik
4. Evaluasi dengan pendalaman atas revisi indikator kinerja upaya hukum kasasi dari target semula menjadi 45% telah tertuang dalam dokumen rapat
5. SK penunjukan Hakim Tinggi pengawas bidang telah diupload
6. Tindak lanjut hasil evaluasi adalah berupa Reviu Renstra. Atas perubahan target indikator kinerja upaya hukum kasasi menjadi 45%, nilai capaian menjadi 109,67% dari sebelumnya 99%. Perbandingan target, realisasi dan capaian kami lampirkan sebagai eviden poin 7
7. Eviden perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik dari pemanfaatan hasil evaluasi kinerja berjenjang ataupun pengawasan bidang telah diupload berupa perbandingan capaian kinerja sebelum dan setelah reviu perubahan target kinerja. Dengan adanya evaluasi berjenjang maka target yang sulit dicapai dapat direviu sehingga capaian kinerja secara keseluruhan dapat dicapai



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

8. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, sehingga berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2024 sebagai perbaikan maka di Tahun 2025 PT Makassar telah melakukan banyak upaya dalam rangka meningkatkan realisasi kinerja yang kami sampaikan melalui monev capaian kinerja Tahun 2025 pada Aplikasi Komdanas

III. PENUTUP

Demikian Rapat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2025 dilaksanakan. Seluruh unit kerja terkait sepakat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WITA oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dengan menginstruksikan agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti secara serius dan terukur serta didukung dengan data pendukung yang memadai, sehingga kinerja Pengadilan Tinggi Makassar ke depan semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Demikian notulen ini dibuat pada hari Rabu, tanggal 30 September 2025, pukul 09.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis


Andi Hafni Zahara, S.E, SH, MM
NIPPPK: 198410032023212024

Mengetahui,


Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM.
NIP. 195810051984031001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

SURAT/MEMO INTERNAL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jl. Urip Sumoharjo, KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id/pt-subselhar@gmail.com

Makassar, 6 Januari 2024

Nomor : 5861.a/KPT.W21.U/HMS.1.1/IX/2025
Perihal : **Undangan rapat**

Kepada Yth.

1. Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc dan Hakim Yustisial
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Kepala Bagian
5. Kepala Sub Bagian
6. PP
7. Pejabat Fungsional dan
8. Seluruh staf

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan rapat bersama ini kami mengundang dengan hormat bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 September 2025
Pukul : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Prof. Dr. H.M Hatta Ali, SH, MH Lt. 2,
gedung Pengadilan Tinggi Makassar

Agenda

1. Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP dari Badan Pengawasan
2. Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi Sakip Tahun 2024

Notulen : Andi Hafni Zahara, SE, SH, MM

mengingat pentingnya rapat ini maka dimohon untuk hadir tepat waktu.

Demiikian pemberitahuan ini disampaikan, atas kehadiran bapak/ibu/ Saudara(i) tepat waktunya, disampaikan terima kasih.



(Pihak Kedua),

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM.
NIP. 195810051984031001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

DAFTAR HADIR



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com
www.cerita.makassar.go.id

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
HARI/TANGGAL
PUKUL
TEMPAT
AGENDA

- Selesai
- 30 September 2025
- 09:00 WITA s/d selesai
- Aula Prof. Dr. H.M Hatta Aji, SH, MH.LL. 2
- 1. Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP dari Badan Pengawasan
- 2. Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi Sakip Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. H. Zamrudin, SH, MSi, M.Hum.	DIT	1	
2	Susanto, SH, SE, M.Hum.	UMPT		2
3	Bani Riwaldi		3	
4	May ius A	HT		4
5	Stacy R. Rantya	HJ	5	
6	Tan Anglin	HT		6
7	Martius Bidala	HJ	7	
8	Ahmad Rosidin	HT		8
9	Sy am Sul Edy	HT	9	
10	Juweska XA	HT		10
11	A. Muf. Pramud	HT	11	
12	Meliana	HT		12
13	Muhammad P. C.	HT	13	
14	Moh. Basir roba	HT		14
15	Ahmad Udayat	HT	15	
16	A. Gaffar	HT		16



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediascenterptmakassar@gmail.com

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
17	Alber Mahius	HAKI	
18	Herjokusio Ojot	IT	
19	Eko Kusyandi	Kat	
20	HERDIYANA	KPOAG	
21	Saanito Sugandi	isaf	
22	Muzik Iman	Isuf	
23	Pu Idris	Isuf	
24	Masnan	Isuf	
25	Aspah	Isuf	
26	Juslinda	Staf p. dan	
27	Abidin	PP	
28	RODDING	PP	
29	Andi Hyanidati	PP	
30	Rajawadi	PP	
31	Suhrijah	HAKI JUST	
32	Pi Dian P	Isuf	
33	Dharmasari		
34	Gunawati		
35	Deppura A V		
36	NW Rismawati		
37	Pon Hironom Pakan	HAKI	
38	Pranata	PP	
39	SYAHRIK	PP-PT	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
40	Muhammad Taufiq T	PP	40
41	Soparubden	PP	41
42	Muhammad Sama	PP	42
43	Muhammad Lirini	P. Bidan	43
44	Abu Mahmud	PP	44
45	Muhammad Lidor	PP	45
46	Hj. Hamisa	PP	46
47	St. Najjah	PP	47
48	Zul Hanif Abdur	Sup. Bidan	48
49	Husnawati	PP	49
50	A. Fatmawati	Staf	50
51	Abd. Latif	PP	51
52	Kasimudi	Kasibidg Kor. PPK	52
53	Feni Febrianti	Staf Bidan	53
54	HASRUL	STAF TPT	54
55	SURHSTA	PP	55
56	Nurpurni	PPK	56
57	Chandra	PP	57
58	Sumarni	PP	58
59	Co. Satrio Kusnadi	PP	59
60	CHSERUL		60
61	Muhammad Wawan	TURT	61
62	HASRUL	PP	62



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90232, www.pt-makassar.go.id, mediacenterptmakassar@gmail.com

DOKUMENTASI

